

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Disusun untuk memenuhi UTS Mata Kuliah

Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia. S.A.N., M.A., Ph.D



Disusun oleh :

Putri Novianti (2216041114)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

OLEH

PUTRI NOVIANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini, kami mengadopsi sistem pengukuran kinerja yang terfokus pada indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum mencapai standar kinerja yang diharapkan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum, termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan. Dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat serta menjaga aspek produktivitas dan akuntabilitas dalam setiap proyek jalan yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk mengimplementasikan perubahan dan pembaruan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas layanan dan memastikan infrastruktur jalan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang pengukuran kinerja dalam sektor publik, khususnya dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Kata Kunci: Kinerja, Pembangunan, Pemeliharaan, Infrastruktur, Jalan

ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT IN THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROAD INFRASTRUCTURE IN SOUTH LAMPUNG DISTRICT

BY

PUTRI NOVIANTI

This research aims to evaluate the performance of the Public Works Department in the construction and maintenance of road infrastructure in South Lampung Regency. In this research, we adopted a performance measurement system that focuses on indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The research method used is descriptive qualitative, which allows us to gain an in-depth understanding of the extent to which the Public Works Department achieves expected performance standards. The results of this research provide a comprehensive picture of the performance of the Public Works Department, including the obstacles they face in carrying out their duties. These findings provide valuable insights for future improvements and improvements in performance. In the context of road infrastructure development and maintenance, this research also highlights the important role of local governments in providing quality services to the community and maintaining aspects of productivity and accountability in every road project carried out. It is hoped that the results of this research will provide guidance for the South Lampung Regency Public Works Department to implement the necessary changes and updates to improve service quality and ensure better road infrastructure for the community. In addition, this research also contributes to further understanding of performance measurement in the public sector, especially in the context of road infrastructure development and maintenance.

Keywords: Performance, Development, Maintenance, Infrastructure, Roads

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang berjudul “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan.” Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk tugas ujian tengah semester Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang berharga sepanjang penulisan karya ilmiah ini. Karya tulis ini ditujukan untuk memahami dan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Melalui penggunaan metode penelitian yang relevan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, arahan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari para pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik administrasi publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Putri Novianti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Konsep Kinerja.....	11
2.3 Infrastruktur Jalan.....	16
2.4 Aspek Jaringan dan Klasifikasi Fungsi Jalan.....	17
2.5 Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Tipe Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23

3.6 Teknik Analisis Data.....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.....	26
4.2 Hasil.....	33
4.3 Pembahasan.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.....	30
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan (jiwa) Tahun 2019-2021.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	19
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.....	29
Gambar 3. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berkembang di Indonesia sejak adanya otonomi daerah berupa pembagian atas kekuasaan yang di berikan secara utuh kepada daerah yang bersangkutan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (Herlinda, 2020, p. 14). Selain itu, dalam pemenuhan tugas tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah serta tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan yang berada di bawah kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah secara optimal baik dari segi teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan tersebut (Armando Soares, 2015, p. 232).

Indonesia mengamalkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana konsep ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-empat; *“...Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Pada alinea ini terlihat jelas bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal, memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat. Segala kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab negara seperti memberikan pelayanan dalam pendidikan, pelayanan dalam hal kesehatan, kebutuhan akan administrasi dasar yang berkaitan dengan pembuatan identitas diri, memberikan infrastruktur seperti jalan, dan irigasi ataupun menyediakan sarana transportasi.

Menurut UU No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) mengenai jalan menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bentuk bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah atau pun air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Secara umum jalan diartikan sebagai jalur dimana masyarakat

mempunyai hak untuk melintasinya tanpa menggunakan izin khusus. Jalan adalah prasarana transportasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi penunjang atas segala kebutuhan masyarakat baik kebutuhan perekonomian, sosial, politik maupun pertahanan keamanan. Kondisi jalan yang optimal adalah syarat dasar untuk mendukung pertumbuhan di suatu daerah (Virginia Sisilia Mamahit, 2021, p. 12).

Memberikan penyediaan infrastruktur berupa jalan merupakan salah satu tugas dari pemerintah sebagai bentuk menyejahterakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagai instansi yang mendapat tugas dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menjalankan tugasnya untuk memberikan dan menjaga kualitas dari pelayanan publik tersebut agar tetap optimal.

Akhir-akhir ini kerusakan jalan menjadi permasalahan besar sehingga dijadikan topik utama di berbagai platform media massa nasional. Hal ini diakibatkan banyak ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten maupun kota, dan jalan desa yang mengalami kerusakan perkerasan struktural jalan padahal pekerjaan baru saja selesai dan masih pada tahap pemeliharaan oleh pemerintah. Hal ini kebanyakan terjadi sebelum masa layanan berakhir sehingga proses pengelolaan jalan yang selama ini diterapkan masih belum memberikan hasil yang maksimal. Keadaan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dimana pemerintah hanya fokus pada upaya memperbaiki infrastruktur jalan dan belum tertuju pada arah bagaimana mempertahankan jalan yang telah ada dan yang hendak dibangun agar tetap pada kondisi yang baik sehingga alokasi biaya yang selama ini dikeluarkan untuk upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat dikurangi dan diganti dengan kepentingan pembangunan infrastruktur lain yang tidak kalah pentingnya untuk penunjang hidup masyarakat. Dalam siklus umur layanan jalan, jalan yang sudah dibangun serta dioperasikan lama kelamaan akan mengalami penurunan kondisi dan tingkat pelayanan jalan. Situasi ini dimulai dengan munculnya kerusakan awal berupa retakan pada permukaan jalan yang lama kelamaan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan situasi kerusakan yang

lebih besar dari sebelumnya dimana jalan tidak dapat lagi berfungsi secara optimal terutama untuk pelayanan keperluan lalu lintas. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu hal ini terjadi saat pemeliharaan jalan dimana umur layanan jalan belum mencapai pada tahap mendekati umur rencana sehingga jalan tersebut akan rusak kembali.

Sukirman (1991) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan yaitu repetisi beban kendaraan, sistem drainase jalan yang tidak optimal sehingga air naik ke permukaan jalan akibat sifat kapilaritas, material konstruksi perkerasan jalan yang tidak baik, faktor iklim Indonesia dimana suhu udara serta curah hujan yang tinggi menjadi salah satu indikator penyebab kerusakan jalan, kondisi tanah yang tidak stabil dan proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang optimal sehingga terjadi pergeseran pada permukaan tanah. Dari semua faktor tersebut, faktor beban kendaraan yang tidak terkendali secara terus menerus jika dikombinasikan dengan genangan air akan menjadi faktor utama terjadinya kerusakan jalan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan berupa naiknya biaya operasional kendaraan (BOK), munculnya ketidaknyamanan dalam berkendara, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan berdampak pada perekonomian masyarakat (Asia Foundation, 2008). Kabupaten Lampung Selatan sudah pasti memiliki kontur wilayah yang tidak sama di setiap Kecamatannya. Hal ini menyebabkan potensi kerusakan jalan pada setiap wilayah pun berbeda-beda dan indikator cuaca, lingkungan serta arus lalu lintas menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan jalan.

Menurut data dari Kementerian PUPR periode 2021 di Provinsi Lampung, panjang jalan nasional 1.292,21 km dengan kondisi baik 32,28% (430,06 km), jalan dalam kondisi sedang 60,61% (783,20 km), jalan dalam kondisi rusak ringan 4,38% (56,58 km) dan jalan yang mengalami rusak berat 1,73% (22,37 km). Sementara jalan provinsi 1.693,27 km dengan kondisi baik 64,45% (1.091,24 km), sedang 11,60% (196,40 km), rusak ringan 14,14% (239,44 km) dan rusak berat 9,81% (166,20 km). Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80% (4.958 km), sedang 21,36% (3.133, 54 km), rusak ringan 27,06% (3.969,96 km) dan rusak berat 17,77% (2.607,07 km). Melihat data itu, jalan kabupaten yang paling banyak mengalami kerusakan, yakni sebanyak 44,83% (6.677,03 km).

Sebanyak 52% jalan daerah rusak. Untuk itu, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada tahun 2023.

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdapat sebanyak 43% dari total panjang ruas jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami rusak berat sehingga memerlukan penanganan secara intensif secepat mungkin dan terdapat sebanyak 4,41% kondisi jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami rusak ringan.

Proses pemeliharaan infrastruktur jalan masih terus dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, namun ternyata masih banyak terdapat jalan yang terpantau rusak seperti jalan yang berada di daerah Way Arong Kecamatan Kalianda sampai jalan Tugu Patok Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan jalan penghubung antar kecamatan. Kemudian di jalan Kelurahan Way Lubuk yang rusak parah akibat sering dilewati oleh kendaraan yang membawa muatan yang relatif berat yang mengangkut tanah dan batu serta alat berat saat pembuatan ruas jalan tol Sumatera yang semakin memperparah kerusakan yang terjadi di jalan tersebut bahkan hingga saat ini belum di perbaiki dan mengganggu roda perekonomian masyarakat serta memperlambat waktu pengendara karena harus berhati-hati melintasinya agar tidak terjatuh.

Selain itu, menurut informasi yang dihimpun dari lampungpro.co tanggal 07 Januari 2023 jalan rusak juga terjadi di jalan penghubung antara Kecamatan Palas dan Sragi di Desa Suka Randeg, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan dimana hampir semua badan jalan di penuh dengan lubang, jalan yang bergelombang dan tidak beraspal lagi sehingga mobil yang digunakan untuk membawa hasil bumi tidak dapat masuk. Hal ini kemudian berdampak pada perekonomian masyarakat setempat dimana masyarakat terpaksa membawa hasil bumi dengan cara dipikul atau menggunakan jasa ojek yang akibatnya harga hasil bumi menjadi turun karena biaya angkut kendaraan yang mencapai 30%. Banyaknya lubang-lubang di jalan yang membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan waspada terutama saat turun hujan yang membuat kondisi jalan semakin parah karena terdapat genangan-genangan air yang sering membuat pengguna jalan tidak tahu bahwa di bawah genangan air tersebut terdapat lubang jalan yang cukup dalam sehingga hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya terjadi kecelakaan (Fernando, 2019).

Dalam melakukan pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan seharusnya tidak hanya fokus pada bagian jalannya saja namun juga harus memperhatikan struktur lain yang menjadi penunjang jalan seperti struktur perkerasan jalan, baju jalan, trotoar, drainase jalan serta struktur lain yang menjadi penunjang dari jalan. Sehingga dari pra observasi yang peneliti lakukan terdapat di beberapa titik jalan yang dalam pemeliharannya terlihat hanya mengutamakan jalan yang di lalui oleh kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan jalan tersebut tidak bertahan lama dan rusak kembali. Hal ini kemudian membuat masyarakat merasa tidak nyaman karena masyarakat merasa pelayanan yang di berikan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur tidak optimal dan cenderung asal-asalan.

Akibat dari adanya jalan yang sudah di benahi namun rusak kembali ini lah yang menyebabkan timbul berbagai spekulasi yang menganggap pemerintah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dimana pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai alasan atas setiap dana yang dialokasikan guna membangun dana memelihara infrastruktur jalan dapat di simpan dan di gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dana yang semestinya di pakai untuk kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah tidak di gunakan sesuai dengan semestinya, sehingga masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan sudah bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya atau belum.

Masalah terkait kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan memiliki hubungan erat dengan administrasi negara dalam beberapa hal diantaranya:

1. administrasi negara terlibat dalam alokasi, pemberian anggaran serta penggunaan atas anggaran publik sehingga apabila Dinas Pekerjaan Umum mengalami kendala dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan itu disebabkan oleh masalah anggaran dalam administrasi anggaran.
2. Administrasi negara juga berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pembangunan infrastruktur, hal ini termasuk dalam pemilihan proyek, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Administrasi negara juga berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam Dinas Pekerjaan Umum seperti melakukan pelatihan, rekrutmen serta

manajemen personel yang berhubungan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum.

4. Selanjutnya administrasi negara memiliki peran penting dalam memastikan adanya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek publik guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh Dinas Pekerjaan Umum maka itu terjadi karena Kurangnya pengawasan atau akuntabilitas yang lemah oleh pihak administrasi negara. Jadi masalah dalam Kinerja Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan adalah contoh nyata bagaimana administrasi negara mempunyai hubungan yang erat sehingga dapat berdampak besar dalam keberhasilan atau kegagalan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa bidang di dalamnya salah satunya yaitu bidang yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu bidang Bina Marga yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas penyiapan perumusan dalam kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga di bawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan menjadi pembahasan menarik terkait fungsi jalan. Bidang Bina Marga tentu saja bertanggung jawab atas permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sehingga kinerja Bidang Bina Marga dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Bidang Bina Marga sendiri mempunyai beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi yang dimilikinya yaitu:

1. Sistem konektivitas daerah yaitu jalan dan jembatan yang belum tersedia secara optimal.
2. Masih banyak kondisi jalan yang rusak berat yang perlu di tangani secara intensif dan cepat.
3. Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan yang belum memiliki jalur penghubung seperti jembatan.

4. Akses pendukung kehidupan masyarakat berupa jalan untuk produksi pertanian yang belum tersedia secara optimal sehingga mengakibatkan tingginya ongkos produksi angkut hasil pertanian.
5. Masih kurangnya sarana alat berat dan kondisi peralatan yang sudah berumur tua sehingga sering mengalami kerusakan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
6. Belum optimalnya terhadap pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap mutu dan pelayanan infrastruktur yang dibangun di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan”**. karena peneliti berharap kedepannya kerusakan infrastruktur jalan bisa ditangan dengan lebih cepat dan serius oleh pihak pemerintah sehingga para pengguna jalan dan masyarakat setempat mampu menggunakan fasilitas publik dengan nyaman dan optimal mengingat jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam penunjang kegiatan masyarakat sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik?
2. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berhubungan dengan Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan di bidang Administrasi Negara khususnya Pelayanan Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan saran dan masukan bagi pemerintah terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan serta diharapkan mampu membantu masyarakat yang memerlukan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul yang seru mengenai kinerja dinas pekerjaan umum sebagai pengguna infrastruktur jalan sudah pernah diteliti dan dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Mujiono, M. Naim Musyafik (2020)	Kualitas Layanan Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pemanfaatan Media Sosial dan Sms Center Sebagai Sarana di Dinas PUPR Kota Blitar)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pengaduan masalah infrastruktur jalan di media sosial dan sms center serta tanggapan oleh Dinas PUPR masuk dalam kategori sangat baik. Pengaruh terhadap kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa variabel jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat terutama oleh empati.	Perbedaan penelitian tertelak pada tipe penelitian dan teknik pengumpulan datanya yaitu kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan studi literatur.
2.	Muhammad Al Derajad (2015)	Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tidak efektif. Di karena kan kurangnya kerjasama antara pihak Dinas dan pihak pekerja terkait bahan baku yang di gunakan, dan juga	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian ini fokus pada mengukur kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur

		di Kecamatan Suaharjo	kurangnya daya tanggap dalam penyediaan bahan baku jalan, fasilitas pejalan kaki dan kurangnya pemantauan akan keberadaan drainase	jalan di Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi : 1. Struktur perkerasan jalan; 2. Bahu jalan dan fasilitas pejalan kaki; 3. Fasilitas drainase jalan. Sedangkan penelitian yang peneliti ambil fokus pada evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan, yang dapat diukur berdasarkan kriteria produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
3.	Dhita Flafiya Indriyani (2018)	Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)	Prosedur penyelenggaraan jalan daerah oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dimulai dengan pengajuan proposal pembangunan jalan oleh wakil masyarakat. Standar pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan tersebut diatur dalam Pasal 5, 21-33, Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016 tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Namun,	Perbedaannya terletak pada tipe penelitiannya dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

			beberapa aspek tersebut belum mencapai kinerja optimal, terlihat dari masih sering nya di temukan kerusakan jalan mulai dari yang ringan hingga berat di ruas-ruas jalan di wilayah tersebut.	sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum lalu dikembangkan dengan berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.
4.	Retno Hidayati (2017)	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta	Penelitian menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal responsivitas terhadap keluhan masyarakat terkait drainase, tanggap terhadap bencana banjir, serta pemenuhan aspirasi masyarakat telah berjalan cukup baik. Dalam hal responsibilitas, sudah terjadi keselarasan antara hukum dan program kerja yang dijalankan oleh instansi tersebut. Meski akuntabilitas kepada pejabat publik terkait sudah berjalan lancar, namun tanggung jawab terhadap masyarakat masih kurang sehingga pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan program penanggulangan banjir dan genangan masih terbatas.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian ini berfokus pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lingkup penanggulangan banjir dan genangan di sebuah kota. Sedangkan peneliti fokus pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam lingkup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

2.2 Konsep Kinerja

2.2.1 Pengertian kinerja

Kinerja merupakan sebuah istilah yang digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana seseorang, sebuah organisasi ataupun sebuah sistem dalam mencapai hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Konsep kinerja dalam sebuah organisasi dapat menggambarkan bahwa setiap organisasi publik mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu dibuktikan dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ada untuk membuktikan apakah organisasi itu telah melaksanakan tugasnya dengan optimal atau belum. Menurut Kasmir (2019:182) kinerja merupakan sebuah hasil dari kerja ataupun tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas serta tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2019:208-209) terdapat beberapa indikator dalam kinerja yaitu: Pertama yaitu kualitas (mutu) merupakan pengukuran dalam kinerja yang dilakukan dengan melihat kualitas (mutu) dari pekerjaan yang telah dihasilkan oleh suatu proses tertentu. Kedua, kuantitas yaitu hal yang dilakukan untuk mengukur kinerja dengan cara melihat jumlah dari hasil yang dilakukan seseorang. Ketiga, waktu yang artinya terdapat suatu waktu tertentu yang perlu diperhatikan apabila melakukan sesuatu. Jika tidak patuh terhadap waktu yang telah ditentukan maka akan timbul asumsi bahwa kinerja dari sebuah organisasi tersebut tidak baik ataupun sebaliknya.

Menurut Wibowo (2007:7) kinerja sendiri berasal dari kata *performance*. Sehingga ada yang mengartikan *performance* sebagai hasil dari kerja ataupun prestasi kerja. Namun, pada kenyataannya kinerja memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hasil kerja yaitu terkait bagaimana proses dari suatu pekerjaan itu berjalan. Kinerja merupakan suatu hasil dari pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategis dari sebuah organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi yang kuat dalam ekonomi. Jadi, kinerja adalah suatu hal yang terkait dengan bagaimana melakukan sebuah pekerjaan serta hasil yang di dapat dari pekerjaan tersebut.

2.2.2 Tujuan Kinerja

Tujuan dari kinerja dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, namun secara umum tujuan dari adanya kinerja adalah untuk mencapai hasil ataupun pencapaian yang optimal dalam suatu tugas, pekerjaan, aktivitas ataupun tindakan. Kinerja yang baik mampu diukur dalam berbagai cara seperti melihat

dari produktivitas yang dilakukan, efisiensi, kualitas ataupun pencapaian tujuan dalam jangka panjang yang telah dilakukan. Tujuan dari adanya kinerja sering kali melibatkan peningkatan atas hasil atau prestasi dari seseorang, tim atau sebuah organisasi. Menurut Wibowo (2012:41) kinerja diartikan sebagai kegiatan atas pengelolaan sumber daya organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi. Tujuan berkaitan dengan arah, bersifat luas tanpa adanya batasan-batasan waktu serta tidak ada kaitannya dengan prestasi tertentu dalam jangka tertentu. Selain itu, tujuan dalam kinerja berisikan berbagai aspirasi dari setiap pekerjaan. Tujuan dalam kinerja merupakan hal yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan harapan-harapan dalam kinerja individu maupun organisasi. Kesesuaian antara upaya dalam pencapaian tujuan dengan tujuan organisasi akan mewujudkan kinerja yang baik.

2.2.3 Penilaian Kinerja

Dalam sebuah organisasi harus terdapat suatu penilaian yang berguna untuk mengetahui tujuan akhir dalam kinerja. Dalam hal ini penilaian kinerja sangat penting dilakukan agar sebuah organisasi dapat mengetahui keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai pekerjaannya. Selain itu, penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebijakan yang di ambil oleh suatu organisasi. Menurut Henry Simamora (Yani, 2012: 117) penilaian kinerja merupakan tahap yang digunakan oleh organisasi dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan kerja individu. Menurut Hasibuan (Yani, 2012: 118) penilaian kinerja merupakan indikator dalam proses penilaian rasio hasil dalam kinerja nyata berbasis standar kualitas ataupun kuantitas. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi hasil karya personel dalam organisasi dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan tahap yang berkesinambungan untuk mengevaluasi kualitas dari kerja personel serta sebagai upaya untuk meningkatkan kerja personel tersebut dalam sebuah organisasi. Selain itu, penilaian kinerja berguna untuk melakukan penelusuran terhadap pencapaian pada sasaran sistem manajemen (Prihadi, 2004: 124). Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena hal ini akan bermanfaat bagi suatu organisasi secara menyeluruh baik bagi para atasan maupun bagi para

karyawan yang bersangkutan. Terdapat enam hal yang penting yang harus diketahui dalam proses penilaian kinerja yaitu:

1. Keuntungan yang di dapat dari hasil penilaian kinerja.
2. Terdapat unsur-unsur dalam penilaian kinerja.
3. Teknik penilaian kinerja jaman dulu.
4. Cara untuk melakukan kinerja yang berfokus pada masa depan.
5. Ada implikasi dalam tahap penilaian.
6. Adanya umpan balik untuk satuan kerja yang telah mengurus sumber daya manusia dalam sebuah organisasi.

2.2.5 Model Pengukuran Kinerja

Model pengukuran kinerja merupakan sebuah kerangka kerja ataupun metode yang dipakai dalam proses pengukuran dan mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan serta target yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan pendekatan yang sistematis yang berguna untuk memantau, menganalisis serta memahami seberapa efektif suatu organisasi dalam mencapai hasil akhir yang ingin dicapai. Menurut Dwiyanto (dalam A. Fauzi, 2020, hlm. 16), model pengukuran kinerja organisasi mencakup hal-hal berikut:

1. Produktivitas merujuk pada konsep yang tidak hanya mengevaluasi efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas sering diartikan sebagai perbandingan antara input dan output. Konsep ini diperluas untuk memperhitungkan hasil yang diharapkan dari pelayanan publik sebagai indikator kinerja penting.
2. Kualitas pelayanan mengacu pada penilaian kinerja pelayanan dari organisasi publik terhadap masyarakat. Faktor ini semakin krusial dalam mengevaluasi kinerja organisasi pelayanan publik karena kepuasan masyarakat terhadap layanan sering kali tersedia secara mudah dan murah.
3. Responsivitas menyoroti kemampuan organisasi dalam menanggapi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta mengimplementasikannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas juga menggambarkan sejauh mana organisasi publik memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas mengindikasikan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau kebijakan organisasi.

5. Akuntabilitas menekankan sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik sesuai dengan harapan dan norma yang ada dalam masyarakat. Kinerja organisasi publik harus dinilai berdasarkan tidak hanya pencapaian target internal, tetapi juga evaluasi eksternal yang melibatkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan model pengukuran kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menggunakan kelima model tersebut untuk mengukur kinerja dinas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan. Model pengukuran kinerja yang mencakup Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki indikator yang relevan dan sesuai untuk mengevaluasi efektivitas kinerja organisasi terkait pelayanan publik.

Fokus dari adanya pengukuran kinerja pada sektor publik terdapat pada outcome bukan input. Outcome yang dimaksud yaitu outcome yang dihasilkan individu ataupun sebuah organisasi secara menyeluruh. Outcome sendiri harus dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi tersebut dalam sektor publik. Kinerja para pegawai sendiri sangat perlu untuk dilakukan karena hal ini akan menjadi evaluasi terhadap setiap pegawai oleh atasan sebagai tahap lanjutan apabila mengetahui terdapat kekurangan dan kelebihan dari kinerja bawahannya tersebut. Hal ini akan menentukan keputusan apa yang akan diambil terkait hasil kinerja serta komunikasi yang dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan dari instansi tersebut akan cepat tercapai.

2.2.4 Evaluasi Kinerja

Whittaker dalam Mahsun Yang di Kutip Oleh Sartika menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian, kinerja dianggap sebagai alat manajemen organisasi, dan pengukuran kinerja merupakan bagian integral dari sistem pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi (Sartika, 2015, hlm. 136). Definisi evaluasi adalah "proses pengukuran dan perbandingan antara hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Dalam definisi ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yakni: 1) evaluasi merupakan fungsi integral

karena pelaksanaannya berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi, 2) evaluasi adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen, dan 3) evaluasi mengidentifikasi perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang seharusnya dicapai." Dari berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan penilaian sistematis yang bertujuan untuk memahami hasil kerja karyawan dan kinerja keseluruhan organisasi.

2.3 Infrastruktur Jalan

2.3.1 Pengertian Infrastruktur

Menurut American Public Works Association (Stone, 1974, dalam Kodoatie, R.J., 2005), infrastruktur merujuk pada fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh lembaga-lembaga publik untuk mendukung fungsi pemerintahan seperti penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan serupa guna memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Dengan dasar definisi infrastruktur tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan rangkaian fisik yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Menurut Febby dkk (2020) Infrastruktur merujuk pada rangkaian fisik yang meliputi transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara sosial maupun ekonomi. Definisi ini menekankan infrastruktur sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen sarana dan prasarana yang saling terkait. Infrastruktur ini menawarkan layanan dasar yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kegiatan industri, pertanian, serta pembangunan ekonomi lainnya.

Menurut Purwoto dan rekan (2020, hlm. 20), pemeliharaan infrastruktur jalan membawa beragam manfaat, di antaranya:

1. Perubahan biaya relatif dari berbagai jenis sarana transportasi;
2. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat;
3. Peningkatan ketersediaan sarana transportasi;
4. Peningkatan kualitas perjalanan, termasuk waktu, kecepatan, dan peningkatan kualitas infrastruktur;

5. Dampak pada tata guna lahan akibat migrasi dan perubahan pola pemukiman;
6. Peningkatan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi perubahan pola dan struktur masyarakat;
7. Perubahan demografis;
8. Perubahan perilaku operasional di wilayah setempat.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas mengenai infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur menunjukkan sistem fisik yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Infrastruktur ini mencakup jaringan fisik seperti jalan, kereta api, air bersih, bandara, waduk, tanggul, telekomunikasi, dan sarana lainnya yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.3.2 Pengertian Jalan

Jalan merujuk pada infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh komponen jalan, termasuk bangunan pelengkap, yang dirancang untuk lalu lintas kendaraan. Jalan dapat berada di atas permukaan tanah, di bawahnya, atau di atas air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004). Jenis jalan terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk:

1. Jalan umum, yang digunakan untuk lalu lintas umum.
2. Jalan khusus, yang dibangun oleh instansi, badan usaha, individu, atau kelompok masyarakat untuk keperluan pribadi.
3. Jalan tol, yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional dan mewajibkan pengguna untuk membayar tol.

Menurut UU No. 38 Tahun 2004, jalan umum dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status, dan kelas. Sistem jalan umum terdiri dari jaringan jalan primer dan sekunder. Fungsinya dapat berupa arteri, kolektor, lokal, atau lingkungan. Berdasarkan statusnya, jalan umum diklasifikasikan sebagai jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau desa. Kelas jalan umum termasuk bebas hambatan, raya, sedang, dan kecil.

2.4 Aspek Jaringan dan Klasifikasi Fungsi Jalan

2.4.1 Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi atau Peranan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 mengenai jalan, klasifikasi jalan menurut fungsinya terbagi menjadi empat jalan yaitu:

1. Jalan arteri, jalan umum yang berguna untuk angkutan utama dengan jarak perjalanan yang jauh, pengendara rata-rata menggunakan kecepatan tinggi, dan jumlah pengendara yang masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor, jalan ini berguna untuk pengendara dengan jarak tempuh sedang, kecepatan rata-ratanya sedang dan jumlah pengendara yang masuk dibatasi.
3. Jalan lokal, jalan umum yang berguna untuk angkutan setempat dengan jarak tempuh dekat, rata-rata kecepatan rendah dan pengendara yang masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan, jalan yang berguna untuk angkutan masyarakat setempat dengan jarak tempuh pendek, rata-rata kecepatan rendah serta pengendara yang masuk dibatasi.

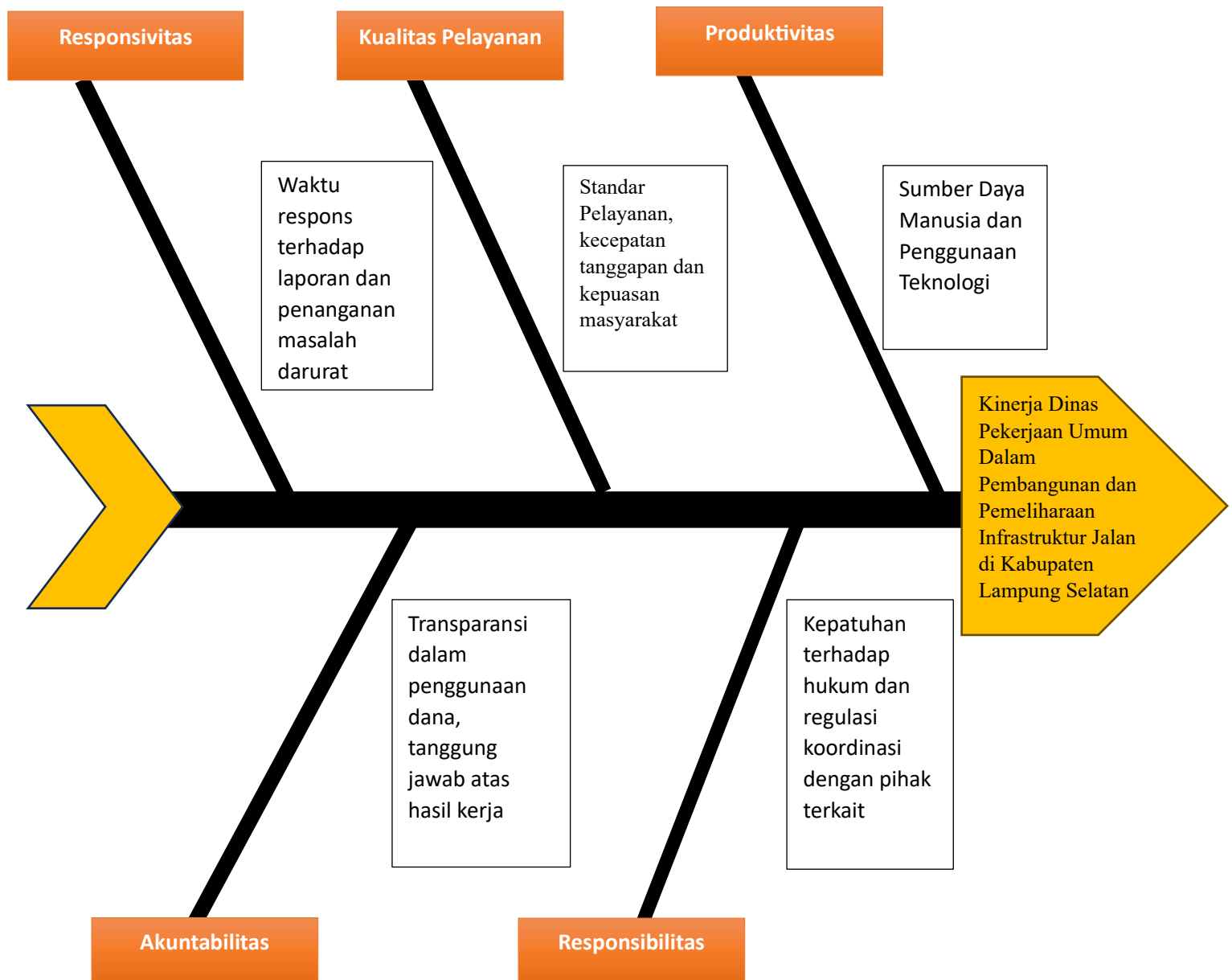
2.4.2 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sekunder yang terjalin dalam hubungan yang hierarki. Sistem jaringan jalan ini tersusun dengan merujuk pada perencanaan tata kelola wilayah dengan tetap memperhatikan keterhubungan antar kawasan dalam kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006.

2.5 Kerangka Berpikir

Upaya perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan merupakan bentuk kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur jalan. Peneliti mengukur kinerja dengan menggunakan model pengukuran kinerja sesuai dengan manajemen organisasi dalam kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2017: 72) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang ada, termasuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena alami maupun buatan manusia. Sedangkan menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa melakukan perbandingan atau kaitannya dengan variabel lain. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang memiliki beragam fokus, termasuk interpretatif dan konstruktif, serta menerapkan pendekatan naturalistik terhadap subjeknya (Trumbull & Watson, dalam Zulazmi 2018). Dengan kata lain, penelitian kualitatif berarti mempelajari suatu topik dari sudut pandang yang alamiah, menginterpretasikannya, dan memahami fenomena dari sudut pandang yang diterima oleh manusia. Secara sederhana, penelitian kualitatif memungkinkan penyelidikan terhadap aspek nyata dunia, meneliti bagaimana individu dapat mengatasi situasi dan berkembang di dalam konteks kehidupan yang menggambarkan kehidupan manusia dalam konteksnya (Yin, dalam Zulazmi 2018). Penelitian kualitatif melibatkan beragam studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, cerita kehidupan, wawancara, observasi, analisis historis, interaksi, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa rutinitas dan problematika serta makna kehidupan individual (Trumbull & Watson, dalam Zulazmi 2018).

Berdasarkan beberapa perspektif tersebut mengenai penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial yang nantinya dapat membentuk kerangka pemikiran berupa konsep untuk membandingkan data. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai kondisi, situasi, fenomena, dan program pelayanan terkait kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan menafsirkan secara komprehensif kinerja pemerintah, terutama Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan

Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan elemen yang sangat penting karena keberadaannya akan mempermudah peneliti dalam menyortir data, terutama mengingat jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan akan melimpah. Oleh karena itu, fokus penelitian memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membatasi proses penelitian yang sedang dilakukan. Dengan adanya fokus penelitian ini, seleksi informan di lapangan akan secara langsung terkait dengan isu yang sedang diselidiki, sehingga fokus dan perumusan masalah akan saling terhubung (Suyitno, 2018, hal. 81-82). Penelitian ini difokuskan pada evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan, yang dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Produktivitas, yang tidak hanya mencakup evaluasi terhadap tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas dari layanan tersebut. Produktivitas secara umum dipahami sebagai perbandingan antara input dan output.
2. Kualitas Pelayanan, hal ini merupakan aspek yang akan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik kepada masyarakat. Saat ini, kualitas layanan semakin menjadi penting dalam menilai kinerja organisasi layanan publik.
3. Responsivitas, yang melibatkan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas kebutuhan, dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program layanan.
4. Responsibilitas, menggambarkan sejauh mana aktivitas organisasi publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dinilai dari aspek internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan di ruas jalan Lintas Sumatra serta Jalan Kecamatan Way Lubuk. Lokasi ini dipilih karena jalan Lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan

gerbang Sumatra yang menjadi penghubung antar provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun sudah dibuat jalan tol sebagai akses alternatif bagi pengendara, namun tidak sedikit pengendara atau masyarakat yang masih menggunakan jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan untuk mereka lewati terutama pengendara bermotor. Selain itu lokasi jalan yang ada di Kecamatan Way Lubuk juga mengalami rusak parah akibat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sehingga kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat serta berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber data Penelitian

3.4.1 Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu jenis yaitu sumber data sekunder. Hal ini merujuk pada data yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti yang dijelaskan oleh Hadi (2015:91). Selain itu, Muhadjir (1998:29) menambahkan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu, data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur secara langsung dan biasanya terwujud dalam bentuk kata-kata verbal, bukan angka. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif mencakup gambaran umum dari objek penelitian.

3.4.2 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tulisan, serta tindakan yang diamati. Data tambahan yang bisa mendukung penelitian ini termasuk dokumen dan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157). Selain itu, menurut Arikunto (2010:172), "Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh". Oleh karena itu, sumber data adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Menurut Ningsih (2015:150) data sekunder (secondary data) adalah informasi yang berasal dari dokumen atau publikasi yang sudah dalam bentuk final. Sementara itu, menurut Sekaran dan Bougie (2017:133), data sekunder (secondary data) merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh individu lain selain peneliti yang sedang melakukan studi saat ini. Data sekunder merujuk pada sumber data dalam penelitian

yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, atau data yang dicatat oleh pihak lain. Jenis data sekunder ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau dokumen. Penulis memperoleh data sekunder ini dengan meminta izin untuk mengakses bukti transaksi yang tercatat di Woodshouse serta buku pencatatan transaksi harian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:224) mengumpulkan data dengan teknik yang tepat menjadi langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan berhasil memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Dokumentasi

Sugiyono (2015: 329) mendefinisikan dokumentasi sebagai metode untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Data yang terkumpul melalui dokumentasi akan dianalisis setelahnya. Menurut Hadari Nawawi (2015:101), dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang melibatkan pengelompokan dan pengklasifikasian materi tertulis yang terkait dengan isu penelitian, termasuk sumber-sumber dari dokumen, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memerlukan dokumen-dokumen terkait penelitian yang akan dianalisis.

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan film dokumenter yang relevan dengan penelitian. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan hanya dari narasumber, tetapi juga dari berbagai sumber tertulis lainnya atau dokumen yang ditemukan pada informan, seperti peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan dalam

permasalahan penelitian, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung serta memperkuat kepercayaan dan pembuktian suatu peristiwa.

3.5.2 Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai teori yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi atau diteliti. Hasil dari studi ini kemudian digunakan sebagai landasan pembahasan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data ini melalui berbagai buku, jurnal, dan karya literatur lainnya yang dianggap relevan dengan konten penelitian. Studi literatur melibatkan rangkaian kegiatan terkait dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, meliputi membaca, mencatat, dan mengelola materi penelitian.

Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku, majalah, dan materi terkait yang relevan dengan isu dan tujuan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai referensi dalam pembahasan hasil penelitian. Studi literatur juga didefinisikan sebagai pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, studi literatur adalah cara untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait objek penelitian. Hal ini karena apabila tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan penelitian dapat berpotensi untuk gagal.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Widi (dalam M. Ali, 2015:40), teknik analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahap kegiatan tersebut meliputi:

1. Reduksi Data

Tahapan reduksi data dapat dianggap sebagai proses pemilihan data, penyederhanaan data yang ada, penyusunan gambaran data yang terkumpul, dan transformasi dari data kasar yang terkumpul dari lapangan. Dalam proses reduksi data ini, dilakukan pemilihan elemen data yang dihilangkan, penandaan bagian data yang relevan, dan analisis bagian-bagian data yang perlu diringkas. Tahapan ini

melibatkan pengelompokan data, penjernihan data, pengarahannya, serta eliminasi data yang tidak perlu, kemudian pengelompokan data sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah melalui proses reduksi disusun secara teratur untuk memungkinkan peneliti agar dapat menarik kesimpulan. Setelah tahap reduksi data, peneliti kemudian menyajikan data secara sistematis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif yang menggambarkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari proses analisis data adalah pengambilan kesimpulan, yang merujuk pada hasil dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan menyusun kesimpulan terkait bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Zulfadrial (2012:89), keabsahan data merujuk pada validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, yang disesuaikan dengan pedoman pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Dalam penelitian kualitatif, menurut Lincoln dan Guba (1985) sebagaimana yang disebutkan dalam Wijaya (2018), keabsahan data bersifat dinamis dan kompleks, dengan kekonsistenan yang beragam. Proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data dapat mencapai keabsahan data, yang melibatkan penggabungan berbagai sumber data.

1. Triangulasi sumber melibatkan pengecekan dari berbagai sumber data seperti wawancara, arsip, dan dokumen.
2. Triangulasi teknik melibatkan pengecekan data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti mengonfirmasi data hasil observasi melalui wawancara.
3. Triangulasi waktu juga memainkan peran penting dalam keabsahan data. Pengujian kredibilitas data memerlukan pemeriksaan melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda, mengakui bahwa waktu dapat mempengaruhi hasil kevalidan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan

4.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah pernyataan dari harapan atau keinginan akan keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Keadaan yang dicita-citakan tersebut merupakan kondisi yang dapat dinilai pencapaiannya melalui beragam upaya pembangunan, yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Selatan yang tetap memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan masalah serta kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang terus meningkat sehingga memunculkan visi yang diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Lampung Selatan lebih maju lagi. Sehingga visi dari Dinas Pekerjaan Umum terutama pada bidang Bina Marga dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan adalah terwujudnya jaringan jalan Provinsi yang mantap, nyaman, aman dan efisien untuk mendukung Lampung menjadi Provinsi unggulan dan berdaya saing.

Misi merupakan pernyataan mengenai aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka merealisasikan Visi. Misi juga bertindak sebagai panduan serta batasan dalam proses mencapai tujuan, sehingga perlu dijadikan dasar untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama periode perencanaan. Untuk merealisasikan visi di atas, langkah umum yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, meningkatkan, dan memperluas infrastruktur jalan dan jembatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif di wilayah infrastruktur.
2. Meningkatkan keterampilan para anggota Dinas Bina Marga dalam mengelola jalan demi meningkatkan profesionalisme.

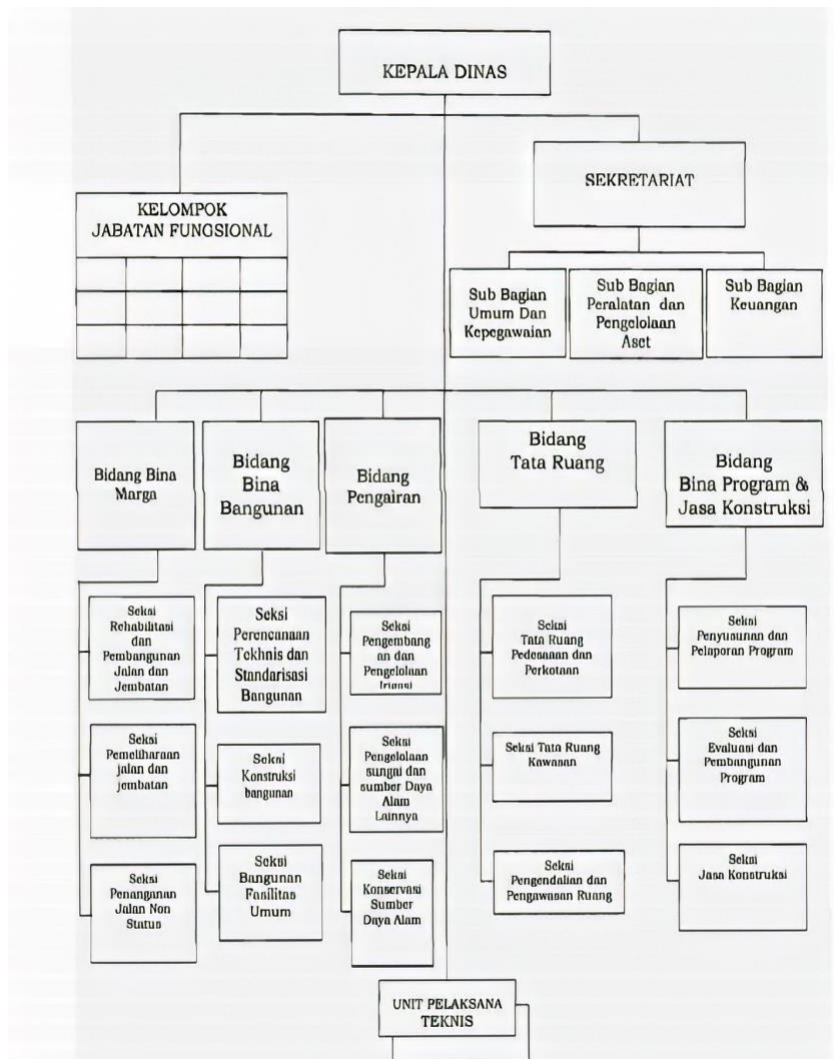
4.1.2 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Seksi Penanganan Jalan Non Status
- d. Bidang Bina Bangunan, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan
 - 2) Seksi Konstruksi Bangunan
 - 3) Seksi Bangunan Fasilitas Umum
- e. Bidang Perairan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
 - 2) Seksi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Bidang Tata Ruang
 - 1) Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan
 - 2) Seksi Tata Ruang Kawasan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang
- g. Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi
 - 1) Seksi Penyusunan dan Pelaporan Program
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program
 - 3) Seksi Jalan Konstruksi
- h. Unit Pelaksana Teknis, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan



4.2 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

4.2.1 Geografis

Kabupaten Lampung Selatan terletak di antara 1050 14' hingga 1050 45' Bujur Timur dan 50 15' hingga 60 Lintang Selatan, menandakan bahwa wilayah ini, seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, tergolong daerah tropis. Di bagian Selatan Kabupaten Lampung Selatan, terdapat sebuah teluk besar, yakni Teluk Lampung yang bernama Pelabuhan Panjang. Pelabuhan ini merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
3. Sebelah barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa. Adapun luas wilayah kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)
1.	Natar	250,88
2.	Jati Agung	164,47
3.	Tanjung Bintang	129,72
4.	Tanjung Sari	103,32
5.	Katibung	188,62
6.	Merbau Mataram	113,94
7.	Way Sulan	46,54
8.	Sidomulyo	158,99
9.	Candipuro	84,90
10.	Way Panji	38,45
11.	Kalianda	179,82
12.	Rajabasa	100,39
13.	Palas	165,57
14.	Sragi	93,44
15.	Penengahan	124,96
16.	Ketapang	108,60
17.	Bakauheni	57,13

(Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan)

4.2.2 Administrasi

Secara administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 Kecamatan sebagai berikut:

1. Natar

2. Jati Agung
3. Tanjung Bintang
4. Tanjung Sari
5. Katibung
6. Merbau Mataram
7. Way Sulan
8. Sidomulyo
9. Candipuro
10. Way Panji
11. Kalianda
12. Rajabasa
13. Palas
14. Sragi
15. Penengahan
16. Ketapang
17. Bakauheni

Berikut ini merupakan peta administrasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan



(Sumber: Peta Tematik Indonesia)

4.2.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas daratan sekitar 2.109,74 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah). Kantor Pusat Pemerintahan terletak di Kota Kalianda, yang diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri. Dari luas total wilayah tersebut, sekitar 45.785 Ha digunakan sebagai lahan pertanian sawah, sementara sisanya, yaitu 122.742 Ha, merupakan lahan non-pertanian. Kabupaten ini juga memiliki 42 pulau, dengan Pulau Sebesi menjadi yang terluas, memiliki luas sekitar 4.643 Ha. Selain itu, terdapat beberapa gunung di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk Gunung Rajabasa yang tertinggi dengan ketinggian 1.280 m di Kecamatan Rajabasa. Kemudian ada beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang, dan Way Gatal.

4.2.4 Demografi

Data demografi Kabupaten Lampung Selatan untuk rentang waktu 2019-2021 meliputi informasi jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Informasi rinci mengenai data tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan (Jiwa) Tahun 2019-2021

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Natar	297.125	284.144
2.	Jati Agung	192.851	181.941
3.	Tanjung Bintang	123.654	118.697
4.	Tanjung Sari	47.966	45.590
5.	Katibung	110.260	104.486
6.	Merbau Mataram	83.376	79.619
7.	Way Sulan	66.959	34.918
8.	Sidomulyo	96.870	92.135
9.	Candipuro	87.673	84.063
10.	Way Panji	26.820	26.787

11.	Kalianda	143.704	135.592
12.	Rajabasa	37.733	34.883
13.	Palas	91.576	88.532
14.	Sragi	53.520	51.920
15.	Penengahan	62.907	59.733
16.	Ketapang	80.637	76.925
17.	Bakauheni	37.723	35.995
	Jumlah	1.641.354	1.535.960

(Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan)

4.3 Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Selatan

Jalan Lintas Sumatera adalah bagian dari sistem jaringan jalan utama yang berfungsi sebagai penyedia layanan distribusi yang menghubungkan berbagai wilayah, menghubungkan pusat distribusi seperti kota. Dalam konteks ini, Jalan Lintas Sumatera merupakan jalur vital bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga apabila jalan ini tidak diperbaiki maka akan mengganggu laju perekonomian masyarakat serta mengganggu mobilitas masyarakat. Kemudian di jalan Kelurahan Way Lubuk yang rusak parah akibat sering dilewati oleh kendaraan yang membawa muatan yang relatif berat yang mengangkut tanah dan batu serta alat berat saat pembuatan ruas jalan tol Sumatera yang semakin memperparah kerusakan yang terjadi di jalan tersebut bahkan hingga saat ini belum di perbaiki dan mengganggu roda perekonomian masyarakat serta memperlambat waktu pengendara karena harus berhati-hati melintasinya agar tidak terjatuh. Dengan adanya kerusakan pada jalan ini terutama saat musim hujan lubang-lubang tersebut akan tergenang air sehingga pengendara sulit untuk melihat dan menyadari keberadaan lubang jalan yang cukup dalam yang tidak jarang banyak pengendara tergelincir khususnya para pengendara motor. Masyarakat awalnya turun tangan sendiri dengan menambal lubang-lubang tersebut menggunakan batu kerikil demi keamanan pengguna jalan. Namun, mereka sadar bahwa hal itu merupakan tugas pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum dalam memberikan fasilitas infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat.

4.4 Hasil

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terkait kinerja mereka dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini menekankan beberapa indikator pengukuran kinerja seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Produktivitas

Dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan, produktivitas dari Dinas Pekerjaan Umum telah menjadi perhatian utama. Terlihat adanya ketidakproduktifan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan yang mengakibatkan keterlambatan yang signifikan dalam penyelesaian pekerjaan. Banyak proyek jalan yang terbengkalai atau tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat. Kurangnya produktivitas ini juga tercermin dalam kurangnya kemajuan dalam meningkatkan kualitas jalan yang ada, yang akhirnya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, terlihat adanya pengelolaan waktu, anggaran dan sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien yang mengakibatkan pemborosan dana publik yang sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk meningkatkan produktivitas Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan memastikan kelancaran aktivitas transportasi di Kabupaten Lampung Selatan.

4.5.2 Kualitas Pelayanan

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan tampaknya mengalami ketidaklancaran. Terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang kurang memadai, seperti tidak rata nya permukaan jalan, kurangnya tanda peringatan, serta tidak sesuainya bahan yang digunakan dengan standar keselamatan. Hal

ini telah menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat terkait keamanan dan kenyamanan penggunaan jalan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, terlihat kurangnya pemeliharaan berkala yang efektif juga telah mengurangi umur pakai infrastruktur jalan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas dalam setiap tahapan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

4.5.3 Responsivitas

Responsivitas mencakup kemampuan suatu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait permasalahan kerusakan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan raya. Ini juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam merencanakan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pemeliharaan jalan guna mengurangi kerusakan. Dengan kemampuan merespons laporan masyarakat, diharapkan hambatan-hambatan dalam upaya pemeliharaan jalan dapat diatasi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di wilayah mereka. Rencana pemeliharaan jalan selalu melibatkan konsultan perencanaan untuk memastikan pengawasan jalan yang tepat. Responsivitas dilihat dari kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyusun rencana pemeliharaan jalan, termasuk sistem informasi yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi serta rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan. Ini juga melibatkan manajemen aset yang mencakup pengaturan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan serta preservasi aset jalan. Selain itu, pembuatan daftar usulan kegiatan pemeliharaan jalan bertujuan untuk menentukan sumber dana, prosedur pemilihan penyedia jasa, identifikasi nomor dan nama ruas jalan, jenis penanganan yang diperlukan, estimasi biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan.

Responsivitas yang dilihat dari kemampuan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkoordinasikan sistem informasi maksudnya adalah apabila terdapat

laporan dari masyarakat ataupun pemberitaan dari media mengenai kerusakan jalan maka Dinas Pekerjaan Umum harus segera melakukan survei untuk memverifikasi laporan tersebut. Jika kondisi jalan diketahui cukup parah, langkah-langkah administratif dan pemeriksaan kondisi jalan akan dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum sebaiknya memiliki data terkait kondisi jalan setiap tahun beserta evaluasi pemeliharaan jalan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memeriksa kebenaran laporan dari masyarakat atau media dengan membandingkannya dengan data yang ada. Jika terbukti adanya peningkatan kerusakan jalan, Dinas Pekerjaan Umum seharusnya melakukan survei untuk mengevaluasi kondisi detail jalan. Namun pada kenyataannya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya merespons berbagai keluhan masyarakat akibat kerusakan jalan hal ini dapat dilihat masih banyaknya jalan yang rusak terutama pada jalan di daerah Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun saat ini, pemerintah Lampung Selatan sudah mulai gencar memperbaiki jalan lintas Sumatera. Namun, perbaikan jalan ini dimulai setelah beberapa waktu lalu Provinsi Lampung viral akibat banyaknya jalan yang rusak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kurangnya responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dalam Kabupaten Lampung Selatan terhadap permintaan dan laporan terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat. Responsivitas yang kurang dari pihak terkait terhadap keluhan dan masalah terkait jalan yang diterima dari masyarakat telah menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan risiko keselamatan bagi para pengguna jalan. Terlalu banyak keluhan yang tidak ditangani dengan segera telah menciptakan kurangnya responsivitas terhadap kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur jalan yang vital. Selain itu, terlihat adanya kelemahan dalam merespons laporan media terkait kerusakan jalan yang berdampak pada citra pemerintah daerah. Kurang responsivitas ini menimbulkan keraguan akan kemampuan dinas dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan responsivitas mereka terhadap kebutuhan mendesak masyarakat terkait

pembangunan dan pemeliharaan jalan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

4.5.4 Responsibilitas

Responsibilitas hanya diterapkan sebagai penilaian kinerja bagi lembaga publik. Responsibilitas adalah parameter evaluasi yang menggambarkan sejauh mana penyelenggara pemerintah mematuhi hukum, peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk memastikan perencanaan pemeliharaan jalan berjalan dengan baik, Dinas Pekerjaan Umum perlu memiliki prioritas yang jelas dan melakukan koordinasi untuk memastikan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal terpenting dari semua kegiatan adalah kemampuan dalam perencanaan teknis, penganggaran, dan pelaksanaan konstruksi, operasional, pemeliharaan jalan, serta pengelolaan sistem manajemen jalan. Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab penting untuk memberi prioritas pada pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara teratur guna mempertahankan standar pelayanan jalan sesuai dengan ketentuan standar minimal yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan pemeliharaan jalan yang telah disusun sebelumnya, dapat dilihat wilayah mana yang memerlukan pemeliharaan jalan lebih lanjut. Hal ini memastikan pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan cepat, menjaga kenyamanan transportasi masyarakat, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan. Setelah penyusunan program pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum menyusun prosedur pemeliharaan yang akan dilakukan dan jenis pemeliharaan yang direncanakan untuk diajukan ke badan legislatif guna mendapatkan persetujuan untuk kegiatan pemeliharaan jalan.

Dinas Pekerjaan Umum tetap mengikuti peraturan dalam proses pengajuan persetujuan untuk tindakan pemeliharaan jalan. Persetujuan dari badan legislatif menjadi hal penting dalam proses permohonan ini untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemeliharaan tanpa gangguan dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan pemeliharaan tersebut. Responsibilitas merujuk pada kemampuan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan prinsip serta peraturan pemerintah. Dalam hal ini, indikator responsibilitas dapat diarahkan pada:

1. Kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang ada: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar kompetensi profesional pegawai pemerintah. Mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses pemeliharaan jalan.
2. Kepastian waktu dalam menanggapi keluhan masyarakat: Dalam pelayanan, kecepatan waktu sangat penting karena masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendapatkan persetujuan pemeliharaan jalan. Meskipun demikian, respons positif dari masyarakat terhadap perbaikan jalan di lingkungan mereka dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masyarakat juga diharapkan untuk menjaga kondisi jalan, sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat beberapa kekhawatiran serius terkait kurangnya responsibilitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Terlihat adanya keterlambatan yang signifikan dalam menanggapi laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang memprihatinkan. Ketidakteraturan dalam perencanaan pemeliharaan jalan dan penanganan keluhan dari masyarakat menyebabkan peningkatan kerusakan yang tak terkendali. Selain itu, kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam menjalankan proyek-proyek pemeliharaan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Ketidakmampuan Dinas Pekerjaan Umum dalam menangani secara tepat waktu dan efektif permintaan masyarakat akan pemeliharaan jalan yang sering kali terabaikan, telah menimbulkan frustrasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Keadaan ini menyiratkan perlunya perbaikan sistem koordinasi, pemantauan, dan tindakan yang lebih responsif dari Dinas Pekerjaan Umum dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan.

4.5.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas memandu sebagian besar reformasi sektor publik dan mendorong para pemangku kepentingan yang terlibat untuk memastikan kinerja pelayanan publik yang baik dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip akuntabilitas melibatkan pelaksanaan pertanggungjawaban, di mana para pihak terkait harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Prinsip ini terutama terkait dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target kebijakan yang ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugasnya, harus secara jelas dan teratur mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam bentuk laporan kepada lembaga atau birokrat yang memiliki kewenangan di atasnya, seperti Bupati atau pihak terkait lainnya. Pertanggungjawaban ini memungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara efektif. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, melainkan juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan semua sumber daya yang ada

Selain Dinas Pekerjaan Umum, satuan kerja yang terlibat dalam proyek jalan kabupaten juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti penyelesaian proyek yang dilakukan dan keberhasilan pekerjaan tersebut. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan program kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dengan mematuhi kebijakan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum meminta laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja pelaksana jalan kabupaten, yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi program kerja yang telah direncanakan. Laporan kondisi jalan setiap tahun juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Laporan ini membuktikan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan serta menjadi pertanggungjawaban atas kinerja mereka yang telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kekhawatiran terkait kurangnya akuntabilitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan. Banyak keluhan dari masyarakat terkait lambannya respons terhadap kerusakan jalan dan penanganan permintaan

perbaikan dari berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang meresahkan di antara para pengguna jalan dan juga mengganggu kelancaran aktivitas transportasi. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan ketidakefektifan pelaporan pertanggungjawaban dalam proyek-proyek yang dilaksanakan, yang mengarah pada kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap integritas dan efisiensi kerja dari Dinas Pekerjaan Umum. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, serta munculnya desakan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan memperlihatkan kekurangan yang signifikan. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini, indikator produktivitas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, termasuk waktu dan anggaran, untuk memastikan penyelesaian proyek secara tepat waktu. Terkait kualitas pelayanan, diperlukan peningkatan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan guna memastikan infrastruktur jalan dapat digunakan dengan aman dan nyaman. Responsivitas perlu ditingkatkan melalui peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan untuk memastikan tindakan cepat atas laporan dan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan. Sementara itu, responsibilitas perlu diperkuat melalui perencanaan yang cermat, koordinasi yang efektif, dan pelaporan yang transparan untuk memastikan setiap tugas dan tanggung jawab dipenuhi dengan tepat. Terakhir, penting untuk memperkuat akuntabilitas dengan memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pengawasan dalam setiap tahap proyek guna memastikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta standar keselamatan yang ditetapkan. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dan aman untuk jangka panjang.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan waktu dan anggaran dalam setiap proyek.
2. Memperkuat penegakan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan melalui pelatihan reguler bagi staf teknis dan pengawas proyek.
3. Mengadopsi sistem pemantauan dan pelaporan yang responsif untuk merespons laporan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan efektif.
4. Memperkuat perencanaan proyek dengan mengintegrasikan koordinasi yang efektif antara departemen terkait dan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan.
5. Meningkatkan transparansi dengan memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pengawasan internal untuk memastikan setiap proyek dipantau dan dilaporkan dengan akurat dan tepat waktu.
6. Mendorong penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk penggunaan sensor dan sistem pemantauan jalan pintar.
7. Membangun hubungan yang kuat antara pemerintah setempat dan masyarakat melalui program partisipasi masyarakat, seperti forum diskusi publik dan pengumpulan umpan balik secara teratur.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dapat meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memastikan infrastruktur jalan yang aman dan berkualitas di Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto (2013:178)” H. Achmad Amins, Dr. MM -“Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Pressindo Jogjakarta. Samarinda 2009.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ugm Press.
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber daya Manusia Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pres.
- Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T.-a. (2020). Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Novita Tresna, “Efektivitas, Efisiensi Organisasi Publik versus Optimalisasi Pelayanan Publik” dalam Juniarso Ridwan, et.al, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Ctk. Pertama, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
- Putra, T. M. (2019). Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramli Muhammad, 2014, Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan, Makassar : Alauddin University Press.
- Semil, N. (2018). Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia. Prenada Media.
- Sellang, K., Sos, S., Jamaluddin, D. H., Sos, S., & Ahmad Mustanir, S. I. P. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.

Sudarmanto, 2015, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.

Jurnal:

Al Hawasyi, M. M. H., Sunaryo, H., & ABS, M. K. (2019). Pengaruh Employee Engagement Dan Quality Of Work Life Terhadap Kinerja Karyawan (Pada Karyawan Bagian Produksi PR. Trubus Alami Sidorejo Kab Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(09).

Febby dkk, “ Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata Dan Kenyamanan Objek Wisata Air Terjun Kermion Distrik Yawosi Biak Utara”, *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)*, Vol. 1, No. 1, November 2020, Institut Sains dan Teknologi Indonesia (ISTI) Manokwari, h.58

Giovani, Devta. 2017. Evaluasi Kinerja DPUPR Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Malang. Universitas Brawijaya Malang.

Ibrahim, I. (2021). Pengawasan Pemeliharaan Infrastruktur Di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(2), 220-234.

MUJIONO, Mujiono; MUSYAFIK, M. Naim. Kualitas Layanan Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pemanfaat Media Sosial Dan Sms Center Sebagai Sarana Pengaduan Di Dinas PUPR Kota Blitar). **REVITALISASI : Jurnal Ilmu Manajemen**, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 95-101, feb. 2020. ISSN 2657-1684. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.884>

Nuridin, I., & Rorimpandey, M. C. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–13. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.630>

Panjaitan, Megaria Elisabeth. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Toba Samosir. Pekanbaru. Universitas Riau.

- Rahayu, W. S., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas Belanja Modal pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 12–16. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.225>
- Rahim, A., Kamil, F. A., & Hakim, L. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Blok Gombang Desa Sanca Kecamatan Gantar . *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(3), 2368–2374. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1973>
- Ransun, Y. F., Kalangie, F., & Sendow, Y. (2017). KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/15560>
- Rizlinia, A., Murtinugraha, R. E., & Hadi, W. (2023). IDENTIFIKASI KOMPETENSI AHLI MUDA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN GUNA MEMINIMALISIR KERUSAKAN: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *SATUKATA: Jurnal Sains, Teknik, dan Studi Kemasyarakatan*, 1(5), 243-254.
- Romlah, S. (2021). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). *PANCAWAHANA: Jurnal Kajian Islam* , 16 (1), 1-13.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2), 834. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215>.
- Saputra. 2020. Pengaruh Quality Of Work Life Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Guru Dan Karyawan Smk Terpadu Allshlahiyah Singosar. e *Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma*.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Soetjipto, J., Wiyono, R., Putra, P., & Alfiah, R. (2022). SYSTEM OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLANNING ON DISTRICT MEDIUM-TERM. *UNEJ E-*

Proceeding, ,

170-179.

Retrieved

from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/32209>

Zainal. 2017. KINERJA PEGAWAI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.

Internet:

Tentang Kami Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
<https://pupr.lampungselatankab.go.id/tentang-kami/> Diakses pada 14 Oktober 2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
<https://lampungselatankab.bps.go.id/> Diakses pada 15 Oktober 2023

Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan
<https://petatematikindo.wordpress.com/2016/02/02/administrasi-kabupaten-lampung-selatan/> Diakses pada 15 Oktober 2023